



## Tinjauan Naratif Sistem Pengendalian Keuangan Negara (Kajian Arthashastra)

**Komang Dewi Susanti**

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

E-mail: [komangdewisusanti1202@gmail.com](mailto:komangdewisusanti1202@gmail.com)

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima 10 September 2023

Disetujui 26 September 2023

Dipublikasikan 22 Oktober 2023

*Keywords:*

Narrative, Arthashastra, State

Financial Control

### Abstract

*The state has an important role in regulating and controlling state finances. This article will examine the state financial control system in the Arthashastra study, which aims to develop existing concepts and combine them with modern economic theory. The research results show that the state financial control system in the Arthashastra study has relevance to modern economic theory. One of the policies taken in controlling state finances is controlling fair tax collection, currency control, currency printing, inflation control, income diversification.*

### Abstrak

Negara mempunyai peran penting dalam mengatur dan mengendalikan keuangan negara. Artikel ini akan mengkaji sistem pengendalian keuangan negara dalam kajian Arthashastra, yang bertujuan mengembangkan konsep yang sudah ada serta mengkombinasikan dengan teori ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian keuangan negara dalam kajian Arthashastra memiliki relevansi dengan teori ekonomi modern. Salah satu kebijakan yang diambil dalam mengendalikan keuangan negara adalah dengan pengendalian pemungutan pajak yang adil, pengendalian mata uang, pencetakan mata uang, pengendalian inflansi, diversifikasi pendapatan.

**Kata Kunci:** Naratif, Arthashastra, Pengendalian Keuangan Negara.

## 1. PENDAHULUAN

Mewujudkan rakyat yang sejahtera adalah salah satu tujuan dari suatu negara. Dalam ajaran Agama Hindu manusia lahir ke dunia ini mempunyai empat tujuan yaitu memperoleh Dharma, Artha, Kama dan Moksa. Salah satu susastra Hindu yang membahas tentang ekonomi adalah kitab Arthashastra. Arthashastra adalah sebuah karya sastra klasik India yang sangat penting dalam sejarah pemikiran politik dan pemerintahan di India. Karya ini dikaitkan dengan cerita Chanakya, seorang cendekiawan, ekonom, dan negarawan India kuno, yang juga dikenal sebagai Kautilya atau Vishnugupta. Arthashastra ditulis dalam bahasa Sanskerta dan diperkirakan berasal dari abad ke-4 sebelum Masehi atau lebih awal.

Arthashastra adalah sebuah panduan yang komprehensif tentang berbagai aspek pemerintahan, politik, ekonomi, dan militer pada masa itu. Karya ini terdiri dari 15 buku yang mencakup berbagai topik, mulai dari organisasi pemerintahan, administrasi, diplomasi, hukum, ekonomi, militer, hingga strategi perang. Tujuan utama dari Arthashastra adalah memberikan panduan praktis bagi pemerintahan yang efisien dan berkelanjutan.

Kitab Arthashastra telah mulai diperkenalkan secara universal sebagai salah satu pedoman dalam membuat kebijakan ekonomi dalam suatu negara. Peran negara dalam membuat kebijakan menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Arthashastra (buku 1, Bab 19, ayat 34) dijelaskan bahwa seorang raja atau pemimpin negara merasakan kebahagiaan apabila rakyatnya sejahtera (kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan bagi seorang raja), apa yang diprogramkan oleh raja bermanfaat bagi rakyat. Dalam sistem pengendalian keuangan negara, keuangan bisa stabil apabila pemerintah mampu membuat perencanaan keuangan,

pengelolaan keuangan dan pengendalian aset negara.

Indonesia perlu waspada terhadap berbagai potensi risiko mulai dari resesi, utang, geopolitik hingga perubahan iklim atau *climate change* yang akan mengancam perekonomian global pada 2023 (Sri Muliani, tempo.co.id jakarta, januari 2022). Potensi resesi tahun ini salah satu mulai tercermin dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan ekonomi global 2023 hanya tumbuh 2,7 persen. Menurut menteri keuangan Sri Muliani pertumbuhan ekonomi global ditahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,2 persen. Tingkat inflansi yang semakin tinggi membuat keresahan bagi rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan. Nilai mata uang rupiah yang semakin turun, harga barang yang semakin tinggi, ditambah kemarau panjang yang terjadi saat ini menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi sehingga perlu mengambil kebijakan dalam pengendalian keuangan. Artikel ini akan mengkaji bagaimana kebijakan yang ditempuh untuk mengendalikan keuangan negara dalam kajian Arthasasta. Melalui tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam menyusun kebijakan keuangan yang mampu mensejahterakan rakyat indonesia.

## 2. KAJIAN TEORI

Arthashastra, kitab klasik yang ditulis oleh Kautilya, berfungsi sebagai panduan untuk pemimpin dalam mengelola negara. Chanakya atau Vishnugupta, seorang menteri negara, ahli politik, dan ahli agama yang hidup pada sekitar tahun 321 sampai 296 Sebelum Masehi, adalah karya klasik dari Arthashastra yang berumur lebih dari 2000 tahun. Pada tahun 1905, Dr. R. Shamasastri, direktur Museum Arkeologi di Mysore, India, pertama kali menerbitkannya. (Edi sujana,2011). Sebagai karya sastra klasik yang luar biasa, Arthashastra seharusnya digunakan sebagai referensi sejarah

akuntansi dan ditempatkan sejajar dengan karya Luca Pacioli. Namun, meskipun para ahli akuntansi belum banyak mengetahuinya, Arthasastra layak dinobatkan sebagai dokumen sejarah yang memuat pencatatan akuntansi untuk pertama kalinya dan dapat digunakan sebagai inspirasi sejarah untuk perguruan tinggi akuntansi. Dalam Arthasastra, banyak ungkapan yang menunjukkan bahwa kegiatan harus didukung dengan bukti. Salah satunya ditemukan dalam Arthasastra 10.89 (Sunitha Dewi, 2019).

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif, mengkaji fenomena yang terjadi dalam suatu wilayah, mendiskripsikan cara mengatasi melalui pendekatan naratif dalam kajian Arthasastra serta mengkombinasikan dengan teori ekonomi modern. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur terhadap kitab Arthasastra, menganalisis, menyajikan data dan penarikan kesimpulan terkait upaya yang dilakukan untuk membuat kebijakan pengendalian keuangan negara.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengendalian keuangan melalui pemungutan pajak yang adil.**

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Pemungutan pajak merujuk pada proses pengumpulan dana oleh pemerintah dari warga negara atau entitas bisnis untuk mendanai berbagai program dan layanan publik. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, pertahanan, dan berbagai kebijakan publik lainnya. Pemungutan pajak melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

##### **a. Pengumpulan Data.**

Pemerintah mengumpulkan data tentang penghasilan dan aset warga negara serta entitas bisnis. Data ini

digunakan untuk menentukan seberapa besar pajak yang harus dibayarkan

##### **b. Perhitungan Pajak.**

Pemerintah atau badan pajak lokal menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan berdasarkan aturan dan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak dapat bervariasi berdasarkan jenis pajak, seperti pajak pendapatan, pajak properti, atau pajak penjualan.

##### **c. Pelaporan Pajak.**

Individu dan perusahaan biasanya wajib melaporkan pendapatan dan aset mereka kepada badan pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Mereka harus mengisi formulir pajak dan melaporkan jumlah yang seharusnya dibayarkan.

##### **d. Pembayaran Pajak.**

Setelah perhitungan pajak selesai, warga negara atau perusahaan harus membayar jumlah yang seharusnya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh badan pajak. Pajak dapat dibayarkan secara langsung atau melalui berbagai metode pembayaran yang disediakan oleh pemerintah.

##### **e. Penegakan Pajak.**

Badan pajak melakukan audit dan penegakan untuk memastikan bahwa pajak telah dibayar sesuai dengan hukum. Jika ditemukan ketidakpatuhan, individu atau perusahaan dapat dikenakan sanksi dan denda.

Dalam ajaran Hindu, pajak dapat dianggap sebagai "Karma" atau tindakan yang mempengaruhi siklus kelahiran dan kematian (*samsara*) dan nasib individu dalam reinkarnasi. Konsep ini terkait dengan etika dan moralitas dalam Agama Hindu. Pajak, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai salah satu bentuk karma sosial atau tindakan yang memengaruhi kehidupan sosial dan spiritual seseorang.

Kitab suci weda dibagian Itihasa pada epos mahabarata dan ramayana menceritakan tentang kebijakan dari seorang raja sebagai memungut pajak kepada rakyatnya secara adil untuk kesejahteraan rakyat. Kewajiban seorang penguasa adalah untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya dan menjalankan pemerintahan yang adil. Ketidakadilan dalam pemungutan pajak atau penyalahgunaan kekuasaan pemerintah bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dalam ajaran Agama Hindu.

Kegiatan pemungutan pajak secara adil, didalam ajaran Agama Hindu diperbolehkan, hal ini tertuang dalam kitab Manawa Dharmasastra X.118 (Pudja, 1978);

*Caturtham ksatrio bha mapadi  
Praja raksanparam caktya  
Kilbisat pratimucyante*

Terjemahannya ;

Seorang ksatria yang dalam keadaan susah mengambil seperempat dari hasil panen dinyatakan bebas dari kesalahan, kalau ia melindungi rakyatnya dengan baik setara dengan kemampuan yang dimiliki.

Artinya :

Seorang pengusaha yang yang telah membayar pajak sebesar seperempat dari hasil usaha kepada negara, maka ia telah melaksanakan kewajiban kepada negara untuk kemakmuran rakyat.

Dalam kitab Arthashastra Buku II Bab VI Bagian 24.1 (Kautilya Chanakya, terjemahan Made Astansa dan Anomdiputro, 2003), menyatakan bahwa "Adminitrator hendaknya mengurus *Durga* (benteng), *Rashtra* (negara bagian), *Khani* (tambang tambang), *Setu* (irigasi), *Vana* (hutan hutan), *Vraja* (ladang gembalan), *Vanikpatha* (jalur peniagaan), sebagai sumber penerimaan. Artinya "Sumber penerimaan pajak bagi negara berasal dari pendapatan keamanan, pendapatan daerah,

pendapatan pertambahan, pendapatan perikanan, pendapatan kayu hasil hutan, pendapatan peternakan, dan pendapatan dari hasil perdagangan.

Arthashastra menekankan pentingnya pengenaan pajak yang adil dan berkeadilan. *Kautilya (Chanakya)*, penulis Arthashastra, berpendapat bahwa pemungutan pajak seharusnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi individu atau kelompok, sehingga mereka yang lebih mampu membayar pajak seharusnya memberikan kontribusi yang lebih besar. Dalam kitab Arthashastra dijelaskan pula pentingnya menghindari penilaian pajak yang sewenang-wenang, korupsi dalam pemungutan pajak, serta memberlakukan hukuman yang ketat untuk menghindari kecurangan pajak. Semua prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan integritas dalam pemungutan pajak.

Prinsip dan kriteria pemungutan pajak dalam Arthashastra adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang dibebankan harus sesuai dengan bidang usaha, hal ini tertuang dalam Buku II Bab 16 Bagian 34.1 yaitu "Direktur perdagangan harus tahu tentang perbedaan harga antara setiap komoditi, dipilih komoditi yang bernilai tinggi dan rendah, tingkat popularitas, kesamaan produk, alokasi waktu pengiriman, waktu pembayaran".
2. Penentuan besarnya pajak berdasarkan pada kualitas dan kuantitas barang (Buku II, Bab 16, Bagian 34.10) yaitu "Seperempat bagian adalah biaya tambahan jika diukur menurut kapasitas seperduapuluh bagian dalam ukuran karena ditimbang, sepersebelas bagian barang dijual dengan menghitung".
3. Jenis dan Besaran Pajak yang Sesuai dengan tingkat pendapatan yang diterima (Buku II Bab 11, Bagian 29.1) yaitu "Pejabat *kosadhyaksa* atau

- pengelola keuangan negara, benda bernilai tinggi, benda bernilai rendah atau hasil hutan yang akan diterima oleh bendahara, terlebih dahulu diperiksa oleh ahli dalam bidangnya”.
4. Penilaian Pajak yang Adil (*Viniyoga samanvaya*), Proses penilaian pajak seharusnya adil dan transparan. Teks ini menyebutkan pentingnya menghindari penilaian yang sewenang-wenang atau korupsi dalam pemungutan pajak.
  5. Efisiensi dalam Pemungutan (*Karasulka*): Arthashastra juga menekankan pentingnya mengumpulkan pajak dengan cara yang efisien, sehingga biaya pemungutan pajak dapat diminimalkan.
  6. Penghindaran Kecurangan (*Aniyama*): Pemerintah harus bekerja untuk menghindari kecurangan dalam pemungutan pajak. Ini termasuk penegakan hukum yang kuat untuk mencegah penyelundupan dan penipuan pajak.

## 2. Pengendalain Mata Uang.

Pengendalian mata uang dalam "Arthashastra" mencerminkan komitmen terhadap stabilitas mata uang dan pengendalian dalam sistem ekonomi pada zaman kuno India. Prinsip-prinsip ini masih memiliki relevansi dalam pengelolaan mata uang dan ekonomi pada zaman modern. Prinsip prinsip pengendalain mata uang mencakup :

- a. Penggunaan Mata Uang Standar.  
*Kautilya* menekankan pentingnya memiliki mata uang standar yang diakui secara luas dalam transaksi ekonomi. Mata uang standar ini menjadi rujukan dalam perdagangan dan tata kelola keuangan.
- b. Penyitaan Koin dan Penyusutan Mata Uang.  
Pemerintah diharapkan untuk mengawasi produksi dan sirkulasi koin, serta menjaga integritas mata

uang dengan menyita koin palsu dan menghancurkan koin yang sudah terlalu lama beredar.

- c. Pengendalian Inflasi dan Nilai Mata Uang.  
Upaya dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang agar tidak terdepresiasi secara berlebihan. Ini mencakup pengendalian inflasi dan penawaran uang yang seimbang.
- d. Pengaturan Harga dan Kualitas Logam Mulia.  
Mengatur harga dan kualitas logam mulia yang digunakan dalam koin adalah salah satu cara untuk menjaga integritas mata uang dan mengendalikan praktik pemalsuan atau penipuan.
- e. Pengelolaan Perdagangan Valuta Asing.  
*Kautilya* juga membahas perdagangan valuta asing dalam konteks perdagangan internasional dan pengelolaan cadangan devisa untuk memastikan stabilitas mata uang negara dalam hubungan dengan mata uang asing.

## 3. Pencetakan mata uang.

Dalam "Arthashastra" karya *Kautilya (Chanakya)*, terdapat beberapa pedoman dan prinsip yang berkaitan dengan pencetakan mata uang “Kepala pencetakan uang (*Laksanadhyaksa*) hendaknya mencetak mata uang perak dengan seperempat tembaga dan mengandung campuran pengeras satu masa dari salah satu bagian yaitu besi, timah dan antimoni untuk mata uang satu pana, setengah pana dan seperdelapan pana, kemudian mata uang tembaga dengan mengandung seperempat campuran, dari mata uang, satu masaka, setengah masaka, satu kakani dan setengah kakani “ (Buku II, Bab 12, Bagian 30.24). *Kautilya* menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam mencetak dan mengelola mata uang untuk menjaga integritas sistem mata

uang negara. Prinsip pencetakan mata uang dalam Arthasastra memiliki relevansi dengan prinsip di Indonesia saat ini. Adapun prinsip yaitu:

a. Kualitas Logam Mulia.

Kautilya menekankan pentingnya menggunakan logam mulia berkualitas tinggi, seperti emas dan perak, untuk pencetakan koin. Logam ini harus murni dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b. Penyitaan Koin Palsu.

Pemerintah diharapkan untuk aktif dalam penyitaan koin palsu yang dapat merusak integritas mata uang. Tindakan penyitaan ini harus dilakukan secara ketat dan terkoordinasi. Hal ini tertuang dalam Buku II Bab XII Bagian 30.25 “pemeriksaan mata uang (Rupadar saka) hendaknya menentukan nilai pana, untuk perdagangan dan untuk penerimaan dalam perbendaharaan.

c. Menghindari Depresiasi Mata Uang.

Kautilya menekankan pentingnya menghindari depresiasi atau penurunan tiba-tiba nilai mata uang. Ini melibatkan pengawasan terhadap peredaran koin yang sudah rusak.

d. Pengendalian Inflasi Mata Uang.

Salah satu tujuan dalam pencetakan mata uang adalah untuk mengendalikan inflasi. Kautilya berpendapat bahwa inflasi mata uang yang tinggi dapat merugikan ekonomi dan masyarakat.

e. Pengelolaan Cadangan Logam Mulia.

Kautilya juga membahas pentingnya pengelolaan cadangan logam mulia, seperti emas dan perak, untuk memastikan pasokan logam mulia yang cukup dalam

sistem mata uang. Hal ini tertuang dalam Buku II Bab XII Bagian 30.23 “direktorat logam logam (lohadyaksa) hendaknya mendirikan pabrik untuk tembaga, timah putih, timah, vaikrntaka, kuningan, baja, perunggu, logam lonceng dan besi, untuk menyeleng garakan perdagangan dalam barang barang logam.

#### 4. Pengendalian infansi.

Dalam "Arthasastra" karya Kautilya (Chanakya), pengendalian inflasi atau pemeliharaan stabilitas harga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan stabilitas negara. Arthassatra Buku II Bab 5 Bagian 23.10 – 12 tentang cara mengendalikan inflansi antara lain; (1) ia hendaknya menerima uang yang disahkan oleh *rupadarsaka* (pemeriksa mata uang), (2) ia hendaknya memotong peredaran mata uang palsu, (3) seseorang yang sengaja mencetak dan menyebarkan mata uang palsu akan didenda terendah untuk kekerasan.

Beberapa prinsip dan strategi pengendalian inflasi yang dapat ditemukan dalam "Arthashastra" adalah:

a. Pengawasan Harga (Buku II Bab VII Bagian 23.2) yaitu disana ia hendak menyuruh mencatat dalam buku catatan, besarnya dari jumlah, kegiatan dan total departemen, jumlah penambahan atau pengurangan dalam penggunaan bahan, biaya kelebihan, biaya tambahan, pencampuran, tempat, gaji dan para pekerja dalam kegiatan dengan pabrik pabrik, harga, mutu, berat, ukuran, tinggi dalamnya dan wadah dalam hubungan permata, benda bernilai tinggi, bernilai rendah dan hasil hutan, hukum, transaksi, adat istiadat dan aturan daerah yang ditentukan desa, kasta, keluarga, dan perusahaan, penerimaan hadiah, tanah, pemakaian, kemudahan,

makanan dan gaji oleh mereka yang mengabdikan kepada raja, penerimaan permata dan tanah, penerimaan gaji khusus dan tindakan perbaikan terhadap musibah yang tiba-tiba, oleh raja dan permaisuri dan putra-putranya, serta pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan perdamaian dan perang dengan sekutu dan musuh. Artinya melibatkan pengendalian harga, termasuk penetapan harga maksimum dan minimum pada beberapa barang, terutama yang dianggap esensial.

b. Pengendalian Monopoli: Teks ini menyebutkan perlunya mengendalikan monopoli dalam perdagangan dan produksi barang-barang tertentu. Kautilya berpendapat bahwa monopoli dapat menyebabkan peningkatan harga yang tidak wajar.

c. Intervensi Pemerintah dalam Pasar: Pemerintah seharusnya dapat berpartisipasi dalam pasar untuk mempengaruhi penawaran dan permintaan. Ini termasuk intervensi dalam distribusi dan perdagangan komoditas.

d. Keuangan Negara yang Sehat: Kautilya menggaris bawahi pentingnya menjaga keuangan negara yang sehat. Ini mencakup pengumpulan pendapatan dan pengendalian pengeluaran agar anggaran negara seimbang.

e. Pengelolaan Logam Mulia: manajemen logam mulia, seperti emas dan perak, yang digunakan sebagai mata uang. Pengelolaan logam mulia ini harus dilakukan dengan bijak untuk mengendalikan inflasi.

## 5. Cadangan Keuangan.

Pengelolaan cadangan keuangan dalam "Arthashastra" adalah bagian integral dari strategi pemerintah dalam

menjaga stabilitas ekonomi dan kekuatan negara. Cadangan keuangan yang sehat dan stabil memungkinkan pemerintah untuk merespons tantangan ekonomi dan politik serta mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan nasional. Prinsip dan strategi yang dapat ditemukan dalam teks ini terkait dengan cadangan keuangan:

### a. Pendapatan Negara yang Stabil.

Kautilya menekankan pentingnya mengumpulkan pendapatan negara secara stabil dan konsisten. Pajak dan pendapatan negara harus diatur dengan bijak untuk memastikan pasokan keuangan yang memadai.

### b. Cadangan dalam Emas dan Logam Mulia.

Kautilya menyarankan bahwa sebagian besar cadangan keuangan negara sebaiknya berupa emas, perak, dan logam mulia lainnya. Logam mulia adalah cadangan yang stabil dan dapat digunakan dalam perdagangan internasional.

### c. Pengendalian Pengeluaran.

Pemerintah seharusnya mengendalikan pengeluaran secara bijaksana. Kautilya mencatat bahwa pengeluaran berlebihan dapat menguras cadangan keuangan dan merugikan keseimbangan fiskal.

### d. Manajemen Utang.

Eks ini juga membahas manajemen utang negara. Peminjaman harus diatur dengan cermat, dan utang yang berlebihan harus dihindari.

### e. Pengelolaan Dana Khusus.

Kautilya menyarankan pembentukan dana khusus atau tabungan untuk keperluan khusus, seperti dana darurat atau dana militer. Ini dapat membantu dalam situasi-situasi darurat atau dalam membiayai kampanye militer.

### f. Pengawasan dan Transparansi.

Penting untuk memastikan bahwa cadangan keuangan dikelola dengan pengawasan yang ketat dan transparansi. Hal ini termasuk audit keuangan dan pelaporan yang jujur.

## 6. Diversifikasi Pendapatan.

Diversifikasi pendapatan dalam "Arthashastra" dirancang untuk mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan. Ini mencerminkan pentingnya memiliki berbagai sumber pendapatan yang dapat mendukung pemerintah dan masyarakat dalam jangka panjang. Meskipun konteksnya berbeda dari zaman modern, konsep diversifikasi pendapatan tetap memiliki relevansi dalam manajemen keuangan saat ini.

### a. Pajak yang Beragam (Kara).

Kautilya menyarankan berbagai jenis pajak yang dapat dikenakan pada berbagai transaksi ekonomi dan sektor bisnis. Ini mencakup pajak atas perdagangan, produksi, dan pertanian. Dengan berbagai jenis pajak, pemerintah dapat mencapai diversifikasi pendapatan.

### b. Pengelolaan Monopoli (Sulka).

Pemerintah dapat menjalankan monopoli atas beberapa barang atau layanan, seperti perdagangan alkohol, yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Pengelolaan monopoli ini dapat memperluas sumber pendapatan negara.

### c. Pendapatan dari Pertambangan dan Sumber Daya Alam (Khanija).

Kautilya juga memberikan panduan tentang bagaimana menghasilkan pendapatan dari kegiatan pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam. Diversifikasi pendapatan dapat mencakup pengelolaan sumber daya alam.

### d. Perdagangan Internasional.

Perdagangan internasional adalah cara untuk mendiversifikasi pendapatan dengan mengimport dan

mengekspor barang dengan negara-negara asing. Ini dapat membantu membawa pendapatan dari luar negeri ke dalam ekonomi negara.

### e. Pengembangan Proyek Ekonomi (Vartani).

Investasi dalam infrastruktur dan proyek ekonomi lainnya, seperti irigasi atau konstruksi jalan, dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah.

## 2. Implementasi pengendalian keuangan negara kajian arthasatra.

Pengendalian keuangan negara sangat penting untuk stabilitas keuangan dan kelangsungan pemerintahan. Kajian arthashastra, yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi dan tata pemerintahan yang telah diterapkan dalam masyarakat kuno, adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami sistem ini. Artikel ini, dengan menggunakan perspektif arthashastra sebagai landasan utama, akan mengulas beberapa aspek penting dari sistem pengendalian keuangan negara.

- Keterbukaan dan akuntabilitas keuangan. Keterbukaan dan akuntabilitas berfungsi sebagai perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip "Avyavaharayogya" dalam Arthashastra menekankan bahwa pejabat pemerintah tidak boleh diperdagangkan atau melakukan praktik-praktik yang tidak etis. Keterbukaan membantu menjaga integritas sistem keuangan negara dan mencegah korupsi.

- Legitimasi Pemerintah: Keterbukaan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memberikan akses publik ke data keuangan negara, pemerintah memperoleh legitimasi di mata publik. Konsep ini sejalan dengan konsep yang ditemukan dalam

Arthashastra yang dikenal sebagai "Lokasamgraha", yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.

- **Pengawasan Publik:** Peran masyarakat dalam mengawasi keuangan negara digariskan dalam Arthashastra. Keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau bagaimana dana publik digunakan. Oleh karena itu, prinsip ini membantu menjaga keadilan sosial dan ekonomi dengan menciptakan dinamika keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat.
- **Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan:** Keterbukaan keuangan menjadi dasar untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan transparansi yang memadai, masyarakat dapat mengevaluasi kebijakan, dan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat.
- **Kepatuhan terhadap Hukum dan Etika:** Arthashastra menekankan betapa pentingnya pemimpin yang bertindak dengan cara yang sesuai dengan hukum dan etika. Keterbukaan dan akuntabilitas berfungsi sebagai cara untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah mengikuti standar moral dan hukum masyarakat.

Oleh karena itu, dalam konteks Arthashastra, keterbukaan dan akuntabilitas keuangan bukan hanya alat administrasi tetapi juga fondasi etis yang membentuk dasar pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, pemerintahan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, yang sesuai dengan

prinsip-prinsip yang dihormati dalam Arthashastra.

### **3.Peran negara dalam membuat regulasi kebijakan keuangan negara.**

Dalam konteks Arthashastra, peran negara dalam menyusun keuangan negara sangat ditekankan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan stabilitas negara. Beberapa aspek kunci peran negara tersebut adalah sebagai berikut:

-**Pemelihara Hukum dan Kewajiban (Raja-Dharmabhrit):**

Arthashastra menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara hukum dan kewajiban dalam masyarakat. Prinsip "Raja-Dharmabhrit" menunjukkan bahwa negara bertindak sebagai pemegang keadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks keuangan negara, hal ini berarti negara memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan fiskal yang mendukung kesejahteraan rakyat dan memastikan distribusi yang adil dari sumber daya keuangan.

-**Pengaturan dan Pembangunan Ekonomi Arthashastra** Peran negara dalam mengatur dan mendorong pembangunan ekonomi sangat dibahas dalam Arthashastra. "Arthashastra" adalah istilah yang mengacu pada ilmu ekonomi dan tata pemerintahan yang digunakan oleh negara untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk merencanakan dan mengelola sumber daya keuangan dengan bijak, negara diharapkan mengambil tindakan strategis.

-**Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Rakyat (Lokasamgraha):** Ide "Lokasamgraha" menekankan bahwa negara harus melindungi dan

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam keuangan, ini dapat diartikan sebagai menjamin bahwa kebijakan fiskal dan alokasi dana publik menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang merata.

-Manajemen Utang Negara (Rnavidya): Pedoman tentang manajemen utang negara tersedia dalam Arthashastra. Negara diharapkan untuk mengelola utang mereka dengan hati-hati dan memastikan bahwa uang itu digunakan untuk kemajuan masyarakat dan negara.

-Pemeliharaan Kestabilan Keuangan Menurut Arthashastra, pemerintah diharapkan untuk menjaga stabilitas keuangan negara dengan mengatur inflasi, pertukaran mata uang, dan kebijakan moneter lainnya.

Menurut prinsip-prinsip Arthashastra, negara diharapkan dapat menciptakan lingkungan keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum rakyat. Peran negara sebagai agen utama dalam menyusun keuangan negara adalah untuk mencapai tujuan ini. Mereka harus melakukannya sesuai dengan prinsip moral dan etika yang dianut oleh Arthashastra.

## 5. PENUTUP

Arthashastra memberikan pandangan yang komprehensif tentang pengendalian keuangan negara. Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam karya ini, seperti pengelolaan sumber daya keuangan, pajak yang adil, anggaran yang bijaksana, dan kontrol terhadap pengeluaran, tetap relevan dalam konteks modern. Dalam mengelola keuangan negara, pemimpin dan administrator dapat belajar banyak dari ajaran Chanakya dalam Arthashastra untuk mencapai

keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan stabilitas ekonomi.

## 6. DAFTAR RUJUKAN

- Arthashastra in ancient India, World Review of Entrepreneurship, Management and Sust. Development, Vol. 3, No. 1, 2007
- Astana, I Made dan c.s Anomdiputro. 2003. Kautilya Canakya Arthashastra. Paramitha Surabaya
- Balakrishnan Muniapan and Junaid M. Shaikh, 2007. Lessons in corporate governance from Kautilya's
- R. Shamasastri, Kautilya 's arthashastra "Translated into english by.1992. books.google.com
- Suartina, I Wayan. Manajemen Hindu. 2020.ISBN.978.623.91636.1.7
- Suhardi, U., & Hemamalini, K. (2021). Pajak Berkeadilan Berdasarkan Catur Purusa Artha. Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu, 12(3), 214-226.  
<https://doi.org/10.36417/widya-genitri.v12i3.419>